

## **BAB IV**

# **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka penyusunan RKPD Kota Surabaya berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, serta mengacu pada Rancangan RKP Tahun 2018 untuk keselarasan program pembangunan daerah. Maka tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 adalah:

**“Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal dan Kemudahan  
Berusaha untuk Menghadapi Persaingan Global dengan Dukungan  
Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam Bingkai Penguatan SDM  
Berkarakter Pancasila”**

Dengan berpedoman pada Tema Pembangunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018 harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu permasalahan, hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran pembangunan ini harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1  
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
<p>SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</p>	<p>1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas</p>	<p>Meningkatkan kualitas pendidikan</p>	<p>Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal</p>
		<p>Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal</p>	
		<p>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin</p>
		<p>Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak</p>	
		<p>Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan</p>	
		<p>Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat</p>	
		<p>Meningkatnya kualitas layanan KB dasar</p>	
		<p>Meningkatkan ketahanan pangan</p>	<p>Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan</p>
		<p>Meningkatkan distribusi pangan</p>	
		<p>Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda</p>	<p>Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan</p>
		<p>Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional</p>	
		<p>Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran</p>	<p>Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja</p>
		<p>Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis</p>	
		<p>2. Memberdayakan masyarakat dan</p>	<p>Meningkatkan penanganan PMKS</p>

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
	menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
		3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah
	4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Meningkatkan kualitas udara dan air
		Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
	5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
		Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
		Meningkatkan upaya konservasi energi	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi
	6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
		Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
		Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda	Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
	7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik
	Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi		
	8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan
			Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Meningkatkan kualitas pelayanan publik			

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
		Memantapkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
	9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa
			Meningkatkan produktivitas koperasi
			Meningkatkan produktivitas sektor pertanian
			Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan
			Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
	Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	
	Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)	
	10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
		Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas			
Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan			

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
		Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Meningkatkan sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih Meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU Meningkatkan pelayanan utilitas kota lainnya

#### 4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 adalah sebagai berikut (sesuai dengan urutan prioritas) :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan;
2. Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi intermoda dan antarmoda;
3. Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata;
4. Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan;
7. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif;
8. Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS;
9. Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi angkatan kerja;
10. Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada sektor industri kreatif dan pertanian;
11. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
12. Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai pancasila;
13. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak;
14. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan;
15. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau.

Tabel IV.2  
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan		
1	Masih adanya penduduk yang belum dapat mengakses pendidikan tingkat SD/MI atau mengakses pendidikan tingkat SD/MI di luar Kota Surabaya	Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar dengan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, utamanya di kecamatan/kelurahan yang masih kekurangan	Tingginya pertumbuhan penduduk usia sekolah, yang lebih tinggi dari angka proyeksi	1	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan	1	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal
2	Masih adanya penduduk yang belum dapat mengakses pendidikan tingkat SMP/MTs atau mengakses pendidikan tingkat SMP/MTs di luar Kota Surabaya	Biaya pendidikan dasar sembilan tahun yang gratis	Banyaknya usia siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas usia yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs				
3	Masih ada sebagian siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas usia siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs						
4	Masih rendahnya partisipasi murni PAUD	Edukasi pada orang tua/ wali siswa supaya menyekolahkan PAUD di usia yang tepat, serta tidak terlalu dini untuk masuk ke jenjang SD/MI	Banyaknya usia siswa PAUD yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan (5,35% siswa PAUD masih dibawah usia 3 tahun), terlebih lagi, batas usia atas yang melanjutkan ke jenjang SD/MI terlalu dini				

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
5	Belum optimalnya partisipasi murni SD/MI	Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar dengan pemerataan perbaikan sarana dan prasarana sekolah	Banyaknya usia siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas bawah usia yang melanjutkan dari PAUD		
6	Belum optimalnya partisipasi kasar SMP/MTs	Biaya pendidikan dasar sembilan tahun yang gratis	Terbatasnya kapasitas SMP/MTs atau banyaknya warg Surabaya usia 13-15 tahun yang bersekolah di luar kota		
7	Tidak terealisasinya ujian sertifikasi kompetensi siswa kejuruan		Tidak ada dukungan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi siswa kejuruan, karena kegiatan sertifikasi tidak dilaksanakan pada siswa yang telah lulus tahun 2016 dan adanya proses pelimpahan P2D (Personil, Peralatan dan Dokumen) ke Provinsi Jawa Timur		
8	Masih ada sebagian lembaga pendidikan non formal yang belum terakreditasi	Kontinuitas pembinaan dan fasilitasi terhadap PKBM dan LKP	Terbatasnya anggaran sedangkan jumlah lembaga pendidikan non formal yang belum terakreditasi cukup banyak		2 Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal
9	Masih adanya tenaga kesehatan yang belum teregistrasi	Melakukan updating rutin, serta secara aktif mengingatkan personil tenaga kesehatan yang telah habis masa berlaku STR-nya, dan mendorong untuk segera memperbarui	Beberapa tenaga kesehatan telah habis masa berlaku STR (Surat Tanda Registrasi)-nya di bulan Desember, sehingga harus menunggu proses perpanjangan STR di PTSP Provinsi Jatim selama 12 hari.		3 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
					4 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak 5 Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan 6 Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat 7 Meningkatkan kualitas layanan KB dasar
10	Rendahnya penggunaan angkutan umum (load factor) Bus Kota dan Angkot	1. Percepatan proses realisasi sistem buy the service pilot project rute MERR (Middle East Ring-Road)  2. Dilakukan restrukturisasi angkutan umum	1. Menurunnya kualitas angkutan umum disebabkan minimnya perawatan  2. Terdapat pilihan moda angkutan lain yang lebih nyaman dan terjangkau, seperti kendaraan pribadi dan angkutan berbasis online  3. Belum tersedianya transportasi massal yang terintegrasi dengan rute angkutan umum sehingga lebih memilih penggunaan kendaraan pribadi	2	Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan massal cepat yang terintegrasi intermoda dan antarmoda  1 Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas  2 Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
11	Kurangnya optimalnya kinerja angkutan umum, baik dari headway maupun load factor-nya	Kurang seimbangya pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi dengan pertumbuhan pembangunan jaringan jalan	1. Dilakukan restrukturisasi angkutan umum  2. Percepatan proses pembangunan Angkutan Massal dan pelaksanaan traffic demand management		3 Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
12	Masih ada sebagian warga Surabaya yang belum mendapatkan akses air bersih PDAM	Melakukan upaya koordinasi dengan PDAM secara intensif sehingga dapat terbangun jaringan air bersih sebanyak 125.066 m	Penambahan jaringan air bersih tidak dapat dilakukan secara langsung, harus melalui mekanisme penyertaan modal ke BUMD PDAM	3	Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata
13	Tidak terealisasinya Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan oleh Pemerintah Kota	Melakukan upaya koordinasi dengan PDAM secara intensif	Berdasarkan rekomendasi dari DPRD Kota Surabaya, pembangunan infrastruktur jaringan air bersih harus melalui penyertaan modal ke PDAM terlebih dahulu		1 Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih  2 Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU  3 Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya
14	Masih relatif tingginya indeks genangan	Percepatan proses pembangunan pompa dan saluran secara terintegrasi	1. Curah hujan lebih tinggi 7% dari tahun sebelumnya, mencapai 240,9 mm  2. Pembangunan pompa masih berproses		4 Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
			3. Saluran belum terintegrasi secara keseluruhan 4. Kurangnya daerah resapan karena semakin banyaknya kawasan terbangun				
15	Masih relatif tingginya angka pelanggaran disiplin aparatur	Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan PD masing-masing	Kurangnya pemahaman PD terhadap peraturan tentang disiplin aparatur	4	Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan	1	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan
16	Kurang optimalnya peningkatan kompetensi pejabat struktural	1. Adanya pengawasan melekat (waskat) terkait pelanggaran disiplin kepada PNS di lingkungan PD masing-masing  2. Antisipasi terhadap jadwal penyelenggaraan diklat yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Kurang efektifnya mekanisme pengendalian internal di lingkungan PD masing-masing  Penyelenggaraan diklat peningkatan kompetensi aparatur yang sangat tergantung pada jadwal penyelenggaraan diklat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur			2	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
						3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
17	Masih belum optimalnya kontribusi bagi hasil BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah	Mendorong PD. Rumah Potong Hewan (RPH) untuk mengoptimalkan utilisasi aset produksi dan menekan fixed cost atas penyusutan aset tidak lancar, mengoptimalkan penggalan sumber-sumber pendapatan baru, serta menekan piutang macet	Kinerja BUMD RPH (Rumah Potong Hewan) yang di bawah ekspektasi			4	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
18	Masih banyak masyarakat yang terlambat dalam mengajukan pengurusan dokumen pencatatan sipil, baik akta kematian maupun akta kelahiran	Melaksanakan publikasi dan sosialisasi yang inovatif dan persuasif lewat berbagai media, selain tetap menerapkan denda bagi pemohon yang terlambat	Kurangnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk segera mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran dan kematian		
19	Perlunya peningkatan kontribusi pendapatan dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Penerapan sistem pajak secara online sebagai upaya intensifikasi pajak daerah	Perolehan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang sedikit di atas target menyebabkan kontribusi pajak terhadap PAD di bawah target		
20	Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan	Perbaiki koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengefektifkan metode dalam proses penyusunan dokumen keuangan, sehingga pihak-pihak eksternal dapat berkontribusi terhadap percepatan penyusunan	Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan yang melibatkan pihak eksternal BPKPD & Pemerintah Kota Surabaya		
21	Rendahnya realisasi dana perimbangan	Mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rendahnya realisasi dana perimbangan karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat (Permenkeu Nomor 249/PMK.07/2015 dan 162/PMK.07/2016)		
22	Rendahnya penyerapan belanja DAK dan bantuan keuangan provinsi		Adanya ketidakjelasan dalam Petunjuk teknis penggunaan dana baik pemerintah pusat maupun Propinsi Jawa Timur yang mempengaruhi realisasi belanja		

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
23	Rendahnya realisasi lain-lain pendapatan yang sah		Adanya penurunan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur				
24	Luasan bangunan dan tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu ditingkatkan	Percepatan proses pengadaan tanah dengan mengefektifkan dan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait	1. Waktu proses administrasi yang cukup panjang  2. Melibatkan beberapa instansi serta masyarakat 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia	5	Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi	1	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
						2	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
25	Masih kurangnya realisasi jumlah aset tanah pemkot yang tersertifikat dibandingkan jumlah aset yang diprioritaskan untuk disertifikatkan	1. Pemenuhan dokumen persyaratan permohonan sertifikasi  2. Koordinasi dengan instansi terkait	Kendala dalam pemenuhan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan permohonan sertifikasi (bukti perolehan pengadaan tanah, bukti penguasaan atas tanah)	5	Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi	3	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
						4	Pengembangan penanggulangan sistem bencana yang antisipatif dan tanggap

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan		
26	Adanya kendala dalam penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<p>1. Pembangunan lapangan olahraga sebagai RTH</p> <p>2. Penambahan panjang dan lebar jalur hijau</p>	Adanya kendala proses pembebasan lahan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau	6	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan	1	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
27	Luasan RTH Optimal terhadap luasan seluruh RTH Kota Surabaya masih relatif kurang	<p>1. Prioritisasi jenis RTH yang perlu diptimalkan serta prioritasasi lokasi berdasarkan analisa kebutuhan</p> <p>2. Analisis permasalahan secara rutin untuk target lokasi dan luasan yang seharusnya dioptimalkan namun belum tercapai</p>	<p>1. Status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan lahan RTH yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota</p> <p>2. Adanya kendala pasang surut air laut terutama di kawasan pesisir</p>			2	Meningkatkan kualitas udara dan air
28	Relatif tingginya volume sampah yang dikelola di TPA	<p>1. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap produksi volume sampah dan sumber-sumber yang berkontribusi cukup dominan dalam peningkatan produksi sampah kota, untuk mempermudah penentuan intervensi terhadap objek-objek yang disasar</p> <p>2. Peningkatan upaya pengurangan produksi sampah melalui 3R serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penerapan 3R serta pemilahan sampah</p>	Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa mempengaruhi peningkatan volume sampah hotel, apartemen, dan mall, demikian pula migrasi penduduk di sekitar wilayah Surabaya juga mempengaruhi peningkatan volume sampah rumah tangga			3	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
		3. Peningkatan jumlah TPS dengan pengelolaan sampah mandiri/3R, untuk mengurangi beban volume sampah yang dikelola TPA					
29	Belum optimalnya luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	Melakukan percepatan proses serah terima fasilitas umum/ fasilitas sosial perumahan oleh pengembang	<p>1. Terdapat masalah pada status lahan pada kawasan permukiman pengembang yang akan diintervensi</p> <p>2. Kurangnya partisipasi aktif pengembang untuk proses serah terima fasus/fasos perumahan sehingga menghambat upaya peningkatan layanan sarana prasarana permukiman</p>	7	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif	1	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
						2	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
						3	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan		
30	Kurangnya minat masyarakat dari kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk terlibat aktif dalam kelompok-kelompok usaha mandiri	Adanya assessment untuk menilai kesiapan peserta	1. Peserta banyak yang memilih tetap melanjutkan bekerja di pabrik/di toko  2. Peserta memilih bekerja sebagai babysitter (pengasuh bayi) 3. Peserta kembali bekerja sebagai guru/bunda PAUD 4. Peserta dilarang oleh suaminya 5. Lebih memilih untuk mengasuh anak/cucu 6. Peserta sakit/hamil 7. Peserta tidak berminat lagi (orientasi pada bantuan modal)	8	Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS	1	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
						2	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
31	Belum efektifnya pemuda kader anti kenakalan remaja untuk mendorong peningkatan wawasan dan karakter kebangsaan pemuda dan organisasi pemuda	Pelaksanaan kegiatan pembentukan kader yang lebih variatif dan dilaksanakan di Kota Surabaya	1. Kegiatan pembentukan kader berlokasi di luar Kota Surabaya  2. Kegiatan yang akan dilakukan bersifat non-profit	9	Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi angkatan kerja	1	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
32	Belum optimalnya cakupan pembinaan pemuda	Variasi kegiatan pembinaan untuk menyesuaikan kebutuhan dan latar belakang pemuda yang diberi pembinaan	Kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kegiatan pembinaan kepemudaan				

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan		
33	Masih relatif tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya	1. Adanya kegiatan yang lebih intensif dan inovatif untuk mempertemukan perusahaan dan pencari kerja  2. Dilakukan upgrading kemampuan dan keterampilan, serta mental para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan	Banyaknya penganggur yang berasal dari lulusan SMA dan SMK			2	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
						3	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis
34	Masih ada sebagian sentra usaha mikro produksi barang dan jasa yang mengalami penurunan omzet dibandingkan tahun sebelumnya	Adanya usaha yang kontinyu dari pemerintah kota untuk membuka lokasi sentra baru	Kurangnya akomodasi dan akses bagi konsumen untuk menjangkau sentra-sentra tersebut	10	Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada sektor industri kreatif dan pertanian	1	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa
35	Adanya ketidakselarasan dalam penetapan target program dan target sasaran pertumbuhan produktivitas koperasi	Adanya pendampingan dalam rangka meningkatkan omzet koperasi baik yang telah aktif, maupun yang baru direvitalisasi	Kurang optimalnya penetapan kinerja perencanaan untuk mendorong tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi			2	Meningkatkan produktivitas koperasi
36	Data Produktivitas tahun 2016 tidak termasuk koperasi yang direvitalisasi karena belum ber-RAT lagi						
37	Masih kurangnya cakupan penyuluh terhadap jumlah kelompok tani	1. Pendampingan lebih intensif	Kelompok tani yang didampingi tidak aktif lagi karena masalah internal, alih profesi, dll.				

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan		
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	
		2. Fasilitasi permodalan dg stakeholder yang menawarkan program kredit rakyat 3. Pengalihan dari komoditas segar ke olahan				
38	Sangat rendahnya produktifitas pertanian garam	Pengembangan Teknologi Tepat Guna, salah satunya sedang dilakukan uji coba produksi garam dengan teknologi rumah kaca	1. Lemahnya penerapan teknologi dalam produksi garam sehingga sangat tergantung pada kondisi cuaca 2. Adanya perubahan iklim/cuaca sehingga jumlah hari hujan per bulan lebih tinggi 9% dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 11,5 hari per bulan			4 Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan
39	Belum optimalnya pengembangan fasilitas di ODTW	Pengembangan dan peningkatan manajemen obyek wisata unggulan untuk menanggulangi over-kapasitas tempat wisata	Keterbatasan lahan untuk peningkatan kapasitas daya tampung obyek wisata			5 Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
						6 Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
						7 Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)
40	Adanya peningkatan jumlah kejadian unjuk rasa di bidang sosial budaya dibandingkan tahun sebelumnya	1. Adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait	Adanya kelompok warga pendatang yang kurang memahami norma masyarakat yang sudah lebih dahulu ada	11	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1 Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
		2. Tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota			2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama
41	Belum optimalnya pelestarian budaya lokal, utamanya terkait pelestarian kesenian dan cagar budaya	Penyelenggaraan pentas seni budaya lokal pada berbagai even secara konsisten	1. Ancaman pengaruh budaya luar terhadap pelestarian budaya lokal karena globalisasi  2. Pemeliharaan bangunan/situs cagar budaya yang belum konsisten	12 Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai pancasila	1 Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
42	Kurangnya atlit yang berprestasi di kejuaraan skala nasional dan internasional	Peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat regional	Minimnya penyelenggaraan kejuaraan olahraga skala nasional dan internasional		2 Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
43	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengawal sistem keamanan lingkungan dan mengenal tokoh pejuang asli Surabaya	1. Dilakukan kegiatan untuk menyadarkan masyarakat agar ikut berperan dalam mengawal sistem keamanan lingkungan.  2. Diadakan kegiatan yang dapat menyadarkan dan mengingatkan masyarakat (anak-anak maupun dewasa) atas jasa tokoh pejuang asli Surabaya	Tingginya pengaruh budaya luar dan tuntutan globalisasi yang menyebabkan minimnya interaksi antar tetangga kampung		3 Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan			
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan		Sasaran Pembangunan	
44	Masih kurangnya kemampuan membaca siswa	Adanya pemetaan untuk pelaksanaan pendampingan di sekolah, khususnya pada sekolah yang hasil reading text level (RTL) siswanya masih kurang	Kurang berimbang jumlah petugas dengan jumlah perpustakaan sehingga tidak tersedia cukup tenaga dan waktu dalam melaksanakan pendampingan			4	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
45	Adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan	Adanya PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	Masih adanya ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya kejadian KDRT	13	Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan
						2	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
46	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan yang relatif rendah	1. Pengembangan city logistic melalui Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial  2. Penyediaan bahan pangan mandiri	1. Pemenuhan kebutuhan bahan pangan sangat tergantung terhadap pasokan dari daerah yang rantai distribusinya terlalu panjang  2. Efektifitas dan efisiensi sistem distribusi barang perlu diperbaiki 3. Gagal panen karena kendala cuaca 4. Kenaikan harga BBM	14	Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan	1	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
						2	Meningkatkan distribusi pangan
47	Meningkatnya potensi permasalahan angkutan jalan karena adanya peningkatan aktivitas perdagangan	Adanya perhatian pemerintah kota dalam pengembangan Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang	Banyaknya pihak yang terlibat di luar pemerintah kota sehingga menimbulkan potensi permasalahan dalam koordinasi, komunikasi serta kerjasama dengan seluruh stakeholder	15	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau	1	Peningkatan sistem manajemen city logistik

Permasalahan Pembangunan		Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
					2 Meningkatkan jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi

Tabel IV.3.  
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			
	Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	
1	Pendidikan						
a	Urusan Pendidikan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-	759.357.992.510	-	759.357.992.510
		Program Penerapan Kurikulum	-	-	32.253.264.427	-	32.253.264.427
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru	-	128.809.112.645	-	128.809.112.645
		Program Peningkatan Prestasi	-	-	16.639.415.195	-	16.639.415.195
		Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	-	-	676.873.885	-	676.873.885
		Program Pendidikan Kesetaraan	Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-	2.566.895.564	-	2.566.895.564
		Program Pendidikan Masyarakat Serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	Program Prioritas Pendidikan Vokasi	-	45.899.935.599	-	45.899.935.599

Prioritas Pembangunan Nasional		Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			
		Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	
	b	Urusan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	-	28.696.640.060	-	28.696.640.060
2	Kesehatan							
	a	Urusan Kesehatan	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	-	172.102.248.850	-	172.102.248.850
				Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-			
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	-	32.575.928.850	-	32.575.928.850
			Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	Program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	-	6.743.194.500	-	6.743.194.500
			Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu	-	-	89.558.291.105	-	89.558.291.105
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/puskesmas Pembantu	-	-	33.105.024.423	-	33.105.024.423

Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
	Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	63.474.010.931	-	63.474.010.931
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	-	77.691.398.575	-	77.691.398.575
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	-	82.618.181.818	-	82.618.181.818
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Prioritas Penguatan Preventif dan Promotif "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"	95.268.407.964	-	95.268.407.964
			Program Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
b	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	2.696.333.200	-	2.696.333.200
		Program Perlindungan Perempuan dan Anak	-	11.406.361.550	-	11.406.361.550

**RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2018**

Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian				Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
	Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	
3	Perumahan dan Permukiman						
a	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak	-	406.324.174.473	-	406.324.174.473
			Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi				
			Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
b	Pertanahan	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Program Prioritas Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Intermoda)	-	624.841.189.280	-	624.841.189.280
		Program Pengamanan Aset	Program Prioritas Reforma Agraria	-	10.931.429.444	-	10.931.429.444
		Program Pengelolaan Aset		-	21.873.037.553	-	21.873.037.553
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata						
a	Urusan Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Prioritas Perbaikan Iklim	-	4.827.531.970	-	4.827.531.970
		Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	-	14.261.160.161	-	14.261.160.161

**RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2018**

Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				
	Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)		
		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	-	2.649.206.863	-	2.649.206.863		
		Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	-	895.390.444	-	895.390.444		
	b	Urusan Pariwisata	Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	Program Pengembangan Destinasi Wisata	-	6.935.268.219	-	6.935.268.219
		Program Pemasaran Pariwisata		-	11.072.764.900	-	11.072.764.900	
		Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif		-	3.920.106.860	-	3.920.106.860	
		Program Legalisasi Usaha Kreatif		-	163.518.125	-	163.518.125	
		Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif		-	191.350.150	-	191.350.150	
		Program Pengembangan Kerjasama Dengan Stakeholder Bidang Pariwisata		-	1.068.201.035	-	1.068.201.035	
	c	Urusan Kebudayaan		Program Perlindungan Budaya Lokal	-	1.709.008.125	-	1.709.008.125
		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal		-	7.854.259.813	-	7.854.259.813	

Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			
	Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	
		Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal	-	-	19.226.183.221	-	19.226.183.221
	d Urusan Penanaman Modal	Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik	Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan	-	222.056.175	-	222.056.175
		Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Penciptaan Lapangan Kerja	-	6.266.810.680	-	6.266.810.680
		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	-	22.412.741.757	-	22.412.741.757
			Program Prioritas Reformasi Birokrasi	-		-	
	e Urusan Perdagangan	Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik Untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial	Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa	-	1.086.610.014	-	1.086.610.014
		Program Perluasan Jangkauan Pemasaran		-	43.779.185.546	-	43.779.185.546
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-	-	3.352.411.395	-	3.352.411.395

**RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2018**

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
			Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	-	-	2.349.787.070	-	2.349.787.070
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	-	-	1.059.409.904	-	1.059.409.904
5	Ketahanan Energi							
	a	Urusan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	-	-	116.671.171.519	-	116.671.171.519
			Program Pengelolaan Kebersihan	-	-	377.308.746.498	-	377.308.746.498
			Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	-	-	13.558.217.200	-	13.558.217.200
			Program Upaya Konservasi Energi	Program Prioritas Energi Baru	-	504.293.725	-	504.293.725
			Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi	-	1.786.639.175	-	1.786.639.175
6	Ketahanan Pangan							
	a	Urusan Pangan	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	Program Proritas Peningkatan Produksi Pangan	-	7.881.776.372	-	7.881.776.372
				Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-		-	

Prioritas Pembangunan Nasional		Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
		Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
b	Urusan Pertanian	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	-	1.711.820.686	-	1.711.820.686
		Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Proritas Peningkatan Produksi Pangan	-	3.197.587.680	-	3.197.587.680
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak		-	1.201.219.374	-	1.201.219.374
		Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Dalam Budidaya Peternakan		-	1.672.126.980	-	1.672.126.980
c	Urusan Kelautan dan Perikanan	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Program Proritas Peningkatan Produksi Pangan	-	4.834.725.264	-	4.834.725.264
		Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan		-	668.804.212	-	668.804.212

Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian				Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
	Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga		Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
7	Penanggulangan Kemiskinan						
a	Urusan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	-	193.728.164.356	-	193.728.164.356
			Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	-	-	3.270.335.217	-	3.270.335.217
b	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-	21.745.636.315	-	21.745.636.315
c	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	-	-	6.475.538.432	-	6.475.538.432
		Program Bina Keluarga	-	-	2.175.070.814	-	2.175.070.814
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	-	-	9.421.262.229	-	9.421.262.229
d	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	-	3.385.777.453	-	3.385.777.453

Prioritas Pembangunan Nasional			Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
			Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	-	-	163.840.554.642	-	163.840.554.642
	e	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi	-	234.561.425	-	234.561.425
			Program Standarisasi Produk Usaha Mikro		-	1.788.827.363	-	1.788.827.363
		Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	-		2.291.363.704	-	2.291.363.704	
		Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	-		2.481.739.475	-	2.481.739.475	
8	Infrastruktur, Konektivitas Dan Kemaritiman							
	a	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	-	495.060.915.773	-	495.060.915.773
			Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Prioritas Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Intermoda)	-	292.813.029.495	-	292.813.029.495

Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				
	Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)		
		Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi	-	7.155.430.373	-	7.155.430.373	
		Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	-	-	209.596.996.556	-	209.596.996.556	
		Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	-	-	863.261.284	-	863.261.284	
		Program Perencanaan Ruang Kota	-	-	6.363.961.500	-	6.363.961.500	
		Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	-	-	12.419.878.861	-	12.419.878.861	
	b	Urusan Perhubungan	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Program Prioritas Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Intermoda)	-	326.978.597.434	-	326.978.597.434
			Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan		-	50.610.142.027	-	50.610.142.027
			Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang		-	782.334.250	-	782.334.250
	c	Urusan Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika	-	41.774.934.756	-	41.774.934.756

**RKPD KOTA SURABAYA TAHUN 2018**

Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian				Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			
	Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)		
		Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Program Prioritas Reformasi Birokrasi	-	21.628.407.580	-	21.628.407.580	
	d	Statistik	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	-	1.156.275.660	-	1.156.275.660	
9	Pembangunan Wilayah							
		Program Penanggulangan Bencana	Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	-	72.210.566.143	-	72.210.566.143	
10	Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan							
	a	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penegakan Peraturan Daerah	Program Prioritas Kepastian Hukum	-	46.586.066.829	-	46.586.066.829
			Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan	-	40.592.342.833	-	40.592.342.833
	b	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Program Prioritas Reformasi Birokrasi	-	3.321.888.385	-	3.321.888.385

Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
	Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Prioritas Kepastian Hukum	-	6.094.368.260	-	6.094.368.260
	Program Penataan Daerah Otonom	-	-	146.551.018.926	-	146.551.018.926
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	-	-	2.012.367.909	-	2.012.367.909
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	96.300.023.523	-	96.300.023.523
	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	9.376.909.840	-	9.376.909.840
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	-	11.848.554.816	-	11.848.554.816
	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	-	-	217.799.500	-	217.799.500
	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	-	-	1.231.333.225	-	1.231.333.225

Prioritas Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			
	Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	
11	Penunjang Urusan						
a	Penunjang Urusan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	6.013.642.789	-	6.013.642.789
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	-	-	28.317.698.703	-	28.317.698.703
b	Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Program Prioritas Reformasi Birokrasi	-	5.551.660.413	-	5.551.660.413
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		-	30.080.067.724	-	30.080.067.724
c	Penunjang Urusan Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal		-	6.636.744.736	-	6.636.744.736
d	Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	14.354.605.108	-	14.354.605.108
e	Penunjang Urusan Kearsipan	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		-	-	5.766.453.894	-

Prioritas Pembangunan Nasional		Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD		
		Program Pemerintah Kota Surabaya	Program Prioritas Pembangunan Nasional	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
f	Penunjang Urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	419.393.850.855	-	419.393.850.855
		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	-	-	360.630.657.749	-	360.630.657.749

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah tersebut dijelaskan dalam program-program beserta tolok ukur kinerja sebagaimana Tabel IV.4 tentang Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel IV.4  
Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2018

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
1	<b>Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan</b>			
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya	36,78%	Dinas Pendidikan  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%	
		3. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	100%	
		4. Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	71,40%	
		5. Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar	76,50%	
		6. Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	66,83%	
	Program Penerapan Kurikulum	1. Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	49,11%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	81,60%	
		3. Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	81,60%	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase guru PAUD yang kompeten	65,63%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	74,23%	
		3. Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	80,77%	
		4. Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	97,73%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		5. Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	94,79%	
		6. Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	60,78%	
		7. Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	50,54%	
		8. Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	56,39%	
	Program Peningkatan Prestasi	1. Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	46,15%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	50%	
		3. Persentase PAUD beprestasi	1,70%	
	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	60,88%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	42,95%	
		3. Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	81,85%	
		4. Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	48,98%	
	Program Pendidikan Kesetaraan	1. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	71,07%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	88,51%	
		3. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	90,98%	
	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	1. Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftarkan proses akreditasi	5,73%	Dinas Pendidikan
		2. Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	1,04%	
	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		2. Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	12%	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98,47%	Dinas Kesehatan
		2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96,95%	
		3. Cakupan kunjungan neonatal	85%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		lengkap		
		4. Cakupan imunisasi dasar lengkap	93,83%	
	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	1. Prevalensi Balita Gizi kurang	9,50%	Dinas Kesehatan
		2. Prevalensi Balita gizi buruk	< 1%	
		3. Persentase Penimbangan balita	81,40%	
		4. Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94,64%	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	76%	Dinas Kesehatan
		2. Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	64,52%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	84%	UPT Dinas Kesehatan (RSUD Bhakti Dharma Husada)
		2. Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	84%	UPT Dinas Kesehatan (RSUD dr. Mohamad Soewandhie)
		3. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	73%	Dinas Kesehatan
		4. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	77%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	80%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	85%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		3. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	10 hari	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
		4. Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	45 menit	
		5. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandhie	48 hari	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
		Indikator	Target		
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%	RSUD Bhakti Dharma Husada	
		2. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase rumah sehat	76,50%	Dinas Kesehatan	
		2. Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	82%		
		3. Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	84%		
	Program Keluarga Berencana	1. Persentase peserta KB baru	81,95%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2. Persentase peserta KB aktif	78,40%		
		3. Persentase peserta KB aktif yang <i>drop out</i> kontrasepsi	5,40%		
		4. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmeet need</i> )	20,50%		
	Program Bina Keluarga	1. Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	70,39%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		2. Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun	3,30%		
	<b>2</b>	<b>Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi intermoda dan antarmoda</b>			
		Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Persentase jalan yang terbangun (%)	0,36%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			2. Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	17,18%	
3. Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)			7,74%		
4. Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu			80%		
Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi		1. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	30,06 km/jam	Dinas Perhubungan	
		2. Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%		

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan	1. Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	25 menit	Dinas Perhubungan
		2. Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	42,57 menit	
		3. Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100%	
<b>3</b>	<b>Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata</b>			
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	1. Lama genangan (menit)	50 menit	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2. Luas genangan (ha)	1179 ha	
		3. Tinggi genangan (cm)	15 cm	
		4. Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80%	
	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	1. Persentase pelanggan baru PDAM (%)	14,32%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	1. Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2600250 m	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2. Persentase pemasangan PJU hemat energi	74,26%	
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	1. Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
<b>4</b>	<b>Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan</b>			
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1. Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100%	Inspektorat Badan Kepegawaian dan Diklat
		2. Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100%	
		3. Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100%	
		4. Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100%	
		5. Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100%	
		6. Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	1. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	90,33%	Badan Kepegawaian dan Diklat

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Daya Aparatur	2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	49,05%	
		3. Persentase terbentuknya dan berfungsinya <i>assessment centre</i>	40%	
		4. Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	92%	
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1. Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100%	Bagian Organisasi
		2. Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	100%	
		3. Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	30%	
		4. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%	
	Program Penataan Daerah Otonom	1. Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 31 Kecamatan
		2. Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	56,89%	
	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1. Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	41,70%	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		2. Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	25%	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah	1. Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%	Sekretariat DPRD
		2. Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%	
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	1. Persentase pemanfaatan aset	92%	Seluruh Perangkat Daerah
		2. Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	40%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		3. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	79%	
		4. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	80,77%	
		5. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
		6. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1. Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	Bagian Umum dan Protokol
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42,86%	Bagian Administrasi Kerjasama
		2. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33,33%	
		3. Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	60%	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	Seluruh Perangkat Daerah
		2. Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaannya berkualitas	70%	
		3. Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaannya berkualitas	70%	
		4. Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaannya berkualitas	70%	
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	Badan Perencanaan Pembangunan
		2. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek <i>output</i>	97%	Bagian Administrasi Pembangunan
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	Bagian Hukum
		2. Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%	
		3. Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		4. Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	74%	Seluruh Perangkat Daerah
	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	1. Rata-rata toleransi ( <i>margin of error</i> ) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5%	Badan Perencanaan Pembangunan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99,65%	Perangkat Daerah yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & 31 Kecamatan
		2. Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,60%	
		3. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%	
		4. Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	87,50%	
		5. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93,93%	
		6. Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	
		7. Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100%	
		8. Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	74%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Perhubungan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	35,11%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100%	
	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	1. Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	84%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	9116 kunjungan	Bagian Hubungan Masyarakat
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	75%	Dinas Perdagangan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1. Persentase Peningkatan Pajak Daerah	22,70%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	1. Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	67%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
<b>5</b>	<b>Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi</b>			
	Program Perencanaan Ruang Kota	1. Persentase rencana induk sektoral yang disusun	78,57%	Badan Perencanaan Pembangunan
		2. Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	53,33%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	55.13%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%	
	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	1. Akumulasi luas Pertanahan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	3,503 Ha	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2. Akumulasi luas Pertanahan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	38,59 Ha	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Program Pengamanan Aset	1. Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	16,18%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2. Persentase tanah aset yang tersertifikasi	12,62%	
		3. Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani	100%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengelolaan Aset	1. Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	43,92%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Program Penanggulangan Bencana	1. Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	54 kejadian	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
		2. Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	110 kejadian	Dinas Pemadam Kebakaran
		3. Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	96%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		4. Persentase waktu tanggap $\leq$ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100%	
		5. Persentase kelurahan tangguh bencana	49%	
<b>6</b>	<b>Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan</b>			
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	1. Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	5,40%	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2. Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	43,60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengelolaan Kebersihan	1. Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	15,38%	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		2. Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	4,37%	31 Kecamatan
		3. Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang $\leq$ 1 hari	82,70%	
	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	1. Persentase ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan	60%	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan
<b>7</b>	<b>Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif</b>			
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	55,35%	Dinas Sosial
		2. Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	59%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		3. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	23%	
		4. Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	40%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	1. Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	8 lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	37 unit	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Upaya Konservasi Energi	1. Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	134 kegiatan dan / atau usaha	Dinas Lingkungan Hidup
<b>8</b>	<b>Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS</b>			
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Persentase PMKS yang ditangani	60%	Dinas Sosial dan 31 Kecamatan
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	50%	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	1. Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>9</b>	<b>Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi angkatan kerja</b>			
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1. Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1. Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	1357 orang	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		2. Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	115 kelurahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5%	Dinas Tenaga Kerja
		2. Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	1. Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	64%	Dinas Tenaga Kerja
		2. Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	79%	
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	1. Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7,01%	Dinas Tenaga Kerja

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1. Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3	52%	Dinas Tenaga Kerja
<b>10</b>	<b>Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada sektor industri kreatif dan pertanian</b>			
	Program Perluasan Jangkauan Pemasaran	1. Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	50%	Dinas Perdagangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 31 Kecamatan
		2. Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	50%	
		3. Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	3,59%	
	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	1. Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	4%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Standarisasi Produk Usaha Mikro	1. Persentase usaha mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	25%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2. Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan	25%	
	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	1. Persentase koperasi berklasifikasi AAB	62,21%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	1. Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	73%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	13%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	1. Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	62%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	1. Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	84%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	1. Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	1. Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	13%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	1. Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	1. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	6%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	6%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	6%	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
		4. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	6%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		5. Persentase rumah kreatif yang beroperasi	62,50%	Dinas Perdagangan
	Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif	1. Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	10%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Legalisasi Usaha Kreatif	1. Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	25%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Program Pengembangan Destinasi Wisata	1. Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	27%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata	1. Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	40%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	1. Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	45,48%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	1. Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	12%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2. Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	18%	

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
11	<b>Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum</b>			
	Program Penegakan Peraturan Daerah	1. Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	Satuan Polisi Pamong Praja  31 Kecamatan
		2. Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	
		3. Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	
		4. Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	100%	
	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan	1. Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Dinas Sosial
2. Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar		100%		
12	<b>Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai pancasila</b>			
	Program Perlindungan Budaya Lokal	1. Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,50%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	1. Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	45%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2. Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	64,70%	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase pertumbuhan <i>event</i> literasi yang diselenggarakan	10%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2. Persentase koleksi buku	88,63%	Dinas Pendidikan
		3. Persentase siswa yang terlibat dalam tes <i>reading text levelling</i>	40,40%	
4. Persentase perpustakaan yang berhasil dibina		17,85%		

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal	1. Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	15,50%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pendidikan Dinas Sosial
		2. Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	31 Kecamatan
<b>13</b>	<b>Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak</b>			
	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31 Kecamatan
		2. Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	66,35%	
		3. Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	21%	
		4. Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	
<b>14</b>	<b>Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan</b>			
	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	1. Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	82%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2. Persentase <i>sample</i> yang memenuhi syarat keamanan makanan	84%	Dinas Kesehatan
		3. Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95,5	
	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	1. Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15 kali/ kejadian	Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
		2. Persentase pasar yang dipantau harganya	8%	Dinas Perdagangan

No	Prioritas / Program	Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		Indikator	Target	
15	<b>Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau</b>			
	Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial	1. Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	75%	Dinas Perdagangan
		2. Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	50%	
	Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang	1. Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	106,24 menit	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik	1. Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	24%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	1. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani	57,14%	Bagian Administrasi Kerjasama
2. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi		75%		